



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI**

REVISI
PERJANJIAN
KINERJA
2016

Profesional, Akuntabel, dan Modern



DEWAN PERWAKILAN DAERAH
SEKRETARIAT JENDERAL

**REVISI I
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Juli 2016

SEKRETARIS JENDERAL,

Prof. Dr. SUDARSONO HARDJOSOEKARTO
NIP. 195711251983031001



DEWAN PERWAKILAN DAERAH
SEKRETARIAT JENDERAL

REVISI I
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN TARGET
1	Meningkatnya kualitas dukungan sidang/ rapat/ pertemuan DPD RI.	1. Tingkat kepuasan Anggota DPD RI terhadap dukungan Sidang Paripurna DPD RI dan sidang/ rapat alat kelengkapan DPD RI.	100%	Persentase
		2. Tingkat pemenuhan kebutuhan pertemuan Pimpinan DPD RI dengan Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, dan Unsur Masyarakat Daerah.	100%	Persentase
2	Meningkatnya kualitas draft keputusan/ peraturan DPD RI.	3. Persentase draft keputusan/ peraturan DPD RI terkait fungsi legislasi yang digunakan menjadi keputusan/ peraturan DPD RI.	100%	Persentase
		4. Persentase draft keputusan/ peraturan DPD RI terkait fungsi pengawasan yang digunakan menjadi keputusan/ peraturan DPD RI.	100%	Persentase
		5. Persentase draft keputusan/ peraturan DPD RI terkait fungsi anggaran yang digunakan menjadi keputusan/ peraturan DPD RI.	100%	Persentase

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN TARGET
		6. Persentase draft keputusan/peraturan DPD RI mengenai pedoman dan tata kerja yang digunakan menjadi keputusan/peraturan DPD RI.	100%	Persentase
3	Meningkatnya kualitas hasil penelitian/pengkajian.	7. Persentase hasil penelitian/pengkajian yang digunakan dalam penyusunan hasil kerja DPD RI.	80%	Persentase
4	Meningkatnya kualitas dukungan representasi melalui pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah.	8. Persentase hasil pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah yang ditidakanjuti oleh alat kelengkapan DPD RI	75%	Persentase
5	Meningkatnya kualitas dukungan materi terhadap penguatan kelembagaan DPD RI.	9. Tingkat pemenuhan kebutuhan materi kerjasama dalam dan luar negeri.	100%	Persentase
6	Terwujudnya SDM Aparatur yang menduduki jabatan sesuai dengan standar kompetensi.	10. Persentase pegawai yang menyelesaikan diklat teknis sesuai persyaratan.	100%	Persentase
		11. Persentase pegawai yang memiliki prestasi akademik dengan Indeks Prestasi Kumulatif di atas 3,00 pada program rintisan gelar.	80%	Persentase
7	Terwujudnya kelembagaan yang tepat ukuran dan tepat fungsi.	12. Tingkat pemanfaatan telaahan, evaluasi dan rekomendasi kelembagaan yang responsif sesuai kebutuhan lembaga.	100%	Persentase
8	Tersedianya sistem dan prosedur kerja yang efektif dan efisien.	13. Tingkat pemanfaatan SOP yang sesuai dengan mekanisme kerja (<i>business process</i>).	50%	Persentase

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN TARGET
9	Meningkatnya layanan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel.	14. Tingkat kepuasan Anggota dan Pegawai terhadap pelayanan perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI.	Sangat Puas = 60%; Puas = 20%; kurang puas = 10%; tidak puas = 10%	Tingkat Kepuasan
		15. Penilaian tertinggi capaian standar akuntansi dan pelaporan keuangan DPD RI oleh Kementerian Keuangan.	A	Nilai
		16. Capaian tertinggi opini BPK atas laporan keuangan DPD RI.	WTP	Opini BPK
10	Meningkatnya layanan sistem informasi manajemen.	17. Tingkat kepuasan unit kerja Sekretariat Jenderal DPD RI terhadap layanan Sistem Informasi Manajemen (SIM).	Sangat Puas = 20%; Puas = 40%; kurang puas = 20%; tidak puas = 20%	Tingkat Kepuasan
11	Meningkatnya layanan pemberitaan DPD RI.	18. Tingkat pemenuhan permintaan pemberitaan kelembagaan di media massa.	100%	Persentase
12	Meningkatnya layanan perpustakaan DPD RI.	19. Persentase kepuasan pengunjung terhadap layanan perpustakaan.	Sangat Puas = 20%; Puas = 40%; kurang puas = 20%; tidak puas = 20%	Tingkat Kepuasan

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN TARGET
13	Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kerja yang modern dan sesuai dengan kebutuhan.	20. Persentase pemenuhan permintaan kebutuhan sarana dan prasarana yang modern.	100%	Persentase
14	Meningkatnya pengawasan pelaksanaan kegiatan pada unit kerja Setjen DPD RI.	21. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.	75%	Persentase

KEGIATAN

ANGGARAN

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Sidang/Rapat Pleno/Tim Kerja | Rp13.724.430.000,- |
| 2. Pertemuan/Jamuan/Konsultasi Pimpinan DPD RI | Rp6.747.575.000,- |
| 3. Penyusunan RUU usul dari DPD RI terkait tugas Komite I, Komite II, Komite III, Komite IV dan PPUU | Rp52,828,512,000,- |
| 4. Penyusunan pandangan/pendapat dan pertimbangan DPD RI atas RUU tertentu terkait tugas Komite I dan Komite III | Rp3.656.140.000,- |
| 5. Perencanaan dan penetapan usul prolegnas DPD | Rp945.305.000,- |
| 6. Pembahasan RUU bersama DPR dan Presiden (Pemerintah) | Rp105.050.000,- |
| 7. Penyusunan hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU tertentu terkait tugas Komite I, Komite II, Komite III, dan Komite IV | Rp14.872.765.000,- |
| 8. Penyusunan pandangan/pendapat dan pertimbangan atas Rancangan APBN dan Non APBN | Rp1.297.700.000,- |
| 9. Pertimbangan DPD RI atas hasil pemeriksaan keuangan negara | Rp1.018.715.000,- |
| 10. Penyusunan Hasil Kerja Panmus | Rp132.300.000,- |
| 11. Kunjungan Kerja ke Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi dalam bentuk Tim | Rp1.380.030.000,- |
| 12. Penyusunan Kebijakan Anggaran dan Kerumahtanggaan, serta Pengawasan Pengelolaan Anggaran | Rp1.158.000.000,- |
| 13. Penyempurnaan Peraturan Tata Tertib DPD RI | Rp414.072.000,- |

14. Penyusunan Pengkajian/Penelitian tentang Kebijakan	Rp908.125.000,-
15. Penelitian Klarifikasi Kajian Tertentu	Rp890.125.000,-
16. Penyusunan Pengkajian/Penelitian tentang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp835.725.000,-
17. Tabulasi Hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dan Daerah	Rp1.055.462.000,-
18. Partisipasi pada Sidang Parlemen dan Kerja Sama Internasional/Regional/Bilateral	Rp4.467.160.000,-
19. Pengkajian Sistem Ketatanegaraan	Rp1.594.765.000,-
20. Pendidikan dan Pelatihan Setjen DPD	Rp1.708.072.000,-
21. Pendidikan Rintisan Gelar	Rp417.575.000,-
22. Evaluasi Kelembagaan Setjen DPD RI	Rp60.000.000,-
23. Penyusunan Standar Prosedur Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI	Rp180.000.000,-
24. Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran, serta RKA-KL DPD RI dan Setjen DPD RI	Rp613.060.000,-
25. Bimbingan Teknis Penyusunan Renja dan RKA-KL DPD RI dan Setjen DPD RI	Rp260.000.000,-
26. Penyusunan perencanaan untuk kantor DPD RI di Provinsi	Rp470.864.000,-
27. Penyusunan Standar Biaya Kegiatan dan Analisis Hak-hak Keuangan DPD RI	Rp315.000.000,-
28. Penyusunan Penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja dalam RKA-KL DPD RI	Rp315.000.000,-
29. Penyusunan Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Belanja Pegawai dan Validasi Data Aplikasi Gaji	Rp135.000.000,-
30. Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengawasan Administrasi Belanja Pegawai	Rp135.000.000,-
31. Rapat Koordinasi dengan Pemda, Lembaga, dan Kelompok Masyarakat tentang Pengelolaan dan Akuntabilitas Keuangan DPD RI	Rp260.399.000,-
32. Monitoring Evaluasi Belanja Gaji dan Tunjangan Anggota	Rp135.000.000,-
33. Penyusunan Sistem Akuntansi Keuangan	Rp175.200.000,-
34. Penyusunan Perhitungan dan Rekonsiliasi Anggaran	Rp144.000.000,-

35. Kegiatan Penyiapan Materi tentang Pemeriksaan Inspektorat, BPK, dan BPKP, termasuk tindak lanjutnya	Rp180.000.000,-
36. Penyusunan Managemen Sistem Perbendaharaan dan Perjalanan Dinas	Rp360.000.000,-
37. Kegiatan Pendampingan Penyusunan Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan DPD RI di Kantor Ibukota Provinsi	Rp663.500.000,-
38. Kegiatan Penyiapan Materi tentang Keuangan, Perjalanan Dinas, Perbendaharaan, dan Realisasi Keuangan dalam rangka Sidang/Rapat DPD dan Rapat Kerja/Koodirnasi	Rp135.000.000,-
39. Pengembangan sistem informasi manajemen	Rp281.600.000,-
40. Pemeliharaan jaringan sistem informasi manajemen	Rp2.255.857.000,-
41. Kegiatan penunjang sistem informasi dan perkantoran DPD RI	Rp14.112.000,-
42. Kegiatan penyajian data dan informasi	Rp717.745.000,-
43. Kegiatan Pemberitaan/Publikasi	Rp2.967.733.000,-
44. Pengadaan Koleksi Buku Perpustakaan	Rp33.500.000,-
45. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Rp25.182.910.000,-
46. Pengadaan Peralatan Penunjang Operasional	Rp1.283.435.000,-
47. Kegiatan monitoring	Rp376.840.000,-
48. Kegiatan reviu dan audit	Rp703.400.000,-

Jakarta, Juli 2016

SEKRETARIS JENDERAL,



Prof. Dr. SUDARSONO HARDJOSOEKARTO
NIP. 195711251983031001



DEWAN PERWAKILAN DAERAH
SEKRETARIAT JENDERAL

**REVISI II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Desember 2016

SEKRETARIS JENDERAL,

Prof. Dr. SUDARSONO HARDJOSOEKARTO
NIP. 195711251983031001



DEWAN PERWAKILAN DAERAH
SEKRETARIAT JENDERAL

REVISI II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN TARGET
1	Meningkatnya kualitas dukungan sidang/rapat/pertemuan DPD RI.	1. Tingkat kepuasan Anggota DPD RI terhadap dukungan Sidang Paripurna DPD RI dan sidang/rapat alat kelengkapan DPD RI.	100%	Persentase
		2. Tingkat pemenuhan kebutuhan pertemuan Pimpinan DPD RI dengan Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, dan Unsur Masyarakat Daerah.	100%	Persentase
2	Meningkatnya kualitas draft keputusan/peraturan DPD RI.	3. Persentase draft keputusan/peraturan DPD RI terkait fungsi legislasi yang digunakan menjadi keputusan/peraturan DPD RI.	100%	Persentase
		4. Persentase draft keputusan/peraturan DPD RI terkait fungsi pengawasan yang digunakan menjadi keputusan/peraturan DPD RI.	100%	Persentase
		5. Persentase draft keputusan/peraturan DPD RI terkait fungsi anggaran yang digunakan menjadi keputusan/peraturan DPD RI.	100%	Persentase
		6. Persentase draft keputusan/peraturan DPD RI mengenai pedoman dan tata kerja yang digunakan menjadi keputusan/peraturan DPD RI.	100%	Persentase

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN TARGET
3	Meningkatnya kualitas hasil penelitian/ pengkajian.	7. Persentase hasil penelitian/ pengkajian yang digunakan dalam penyusunan hasil kerja DPD RI.	80%	Persentase
4	Meningkatnya kualitas dukungan representasi melalui pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah.	8. Persentase hasil pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah yang ditidakanjuti oleh alat kelengkapan DPD RI	75%	Persentase
5	Meningkatnya kualitas dukungan materi terhadap penguatan kelembagaan DPD RI.	9. Tingkat pemenuhan kebutuhan materi kerjasama dalam dan luar negeri.	100%	Persentase
6	Terwujudnya SDM Aparatur yang menduduki jabatan sesuai dengan standar kompetensi.	10. Persentase pegawai yang menyelesaikan diklat teknis sesuai persyaratan.	100%	Persentase
		11. Persentase pegawai yang memiliki prestasi akademik dengan Indeks Prestasi Kumulatif di atas 3,00 pada program rintisan gelar.	80%	Persentase
7	Terwujudnya kelembagaan yang tepat ukuran dan tepat fungsi.	12. Tingkat pemanfaatan telaahan, evaluasi dan rekomendasi kelembagaan yang responsive sesuai kebutuhan lembaga.	100%	Persentase
8	Tersedianya sistem dan prosedur kerja yang efektif dan efisien.	13. Tingkat pemanfaatan SOP yang sesuai dengan mekanisme kerja (<i>business process</i>).	50%	Persentase
9	Meningkatnya layanan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel.	14. Tingkat kepuasan Anggota dan Pegawai terhadap pelayanan perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI.	Sangat Puas = 60%; Puas = 20%; kurang puas = 10%; tidak puas = 10%	Tingkat Kepuasan

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN TARGET
		15. Penilaian tertinggi atas capaian standar akuntansi dan pelaporan keuangan DPD RI oleh Kementerian Keuangan.	A	Nilai
		16. Capaian tertinggi opini BPK atas laporan keuangan DPD RI.	WTP	Opini BPK
10	Meningkatnya layanan sistem informasi manajemen.	17. Tingkat kepuasan unit kerja Sekretariat Jenderal DPD RI terhadap layanan Sistem Informasi Manajemen (SIM).	Sangat Puas = 20%; Puas = 40%; kurang puas = 20%; tidak puas = 20%	Tingkat Kepuasan
11	Meningkatnya layanan pemberitaan DPD RI.	18. Tingkat pemenuhan permintaan pemberitaan kelembagaan di media massa.	100%	Persentase
12	Meningkatnya layanan perpustakaan DPD RI.	19. Persentase kepuasan pengunjung terhadap layanan perpustakaan.	Sangat Puas = 20%; Puas = 40%; kurang puas = 20%; tidak puas = 20%	Tingkat Kepuasan
13	Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kerja yang modern dan sesuai dengan kebutuhan.	20. Persentase pemenuhan permintaan kebutuhan sarana dan prasarana yang modern.	100%	Persentase
14	Meningkatnya pengawasan pelaksanaan kegiatan pada unit kerja Setjen DPD RI.	21. Persentase rekomendasi dan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.	75%	Persentase

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Sidang/Rapat Pleno/Tim Kerja	Rp12.943.063.000,-
2	Pertemuan/Jamuan/Konsultasi Pimpinan DPD RI	Rp6.062.840.000,-
3	Penyusunan RUU usul dari DPD RI terkait tugas Komite I, Komite II, Komite III, Komite IV dan PPUU	Rp47.043.182.000,-
4	Penyusunan pandangan/pendapat dan pertimbangan DPD RI atas RUU tertentu terkait Komite I dan Komite III	Rp3.857.380.000,-
5	Perencanaan dan penetapan usul prolegnas DPD	Rp1.877.648.000,-
6	Pembahasan RUU bersama DPR dan Presiden (Pemerintah)	Rp357.364.000,-
7	Penyusunan hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU tertentu Komite I, Komite II, Komite III, dan Komite IV	Rp16.875.270.000,-
8	Penyusunan pandangan/pendapat dan pertimbangan DPD RI atas RUU APBN dan Non-APBN	Rp1.059.819.000,-
9	Pertimbangan DPD RI atas hasil pemeriksaan keuangan negara	Rp1.184.994.000,-
10	Penyusunan Hasil Kerja Panmus	Rp112.130.000,-
11	Kunjungan Kerja ke Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi dalam bentuk Tim	Rp1.176.030.000,-
12	Penyusunan Kebijakan Anggaran dan Kerumahtanggaan, serta Pengawasan Pengelolaan Anggaran	Rp383.100.000,-
13	Penyempurnaan Peraturan Tata Tertib DPD RI	Rp429.373.000,-
14	Penyusunan Pengkajian/Penelitian tentang Kebijakan	Rp575.700.000,-
15	Penelitian Klarifikasi Kajian Tertentu	Rp575.700.000,-
16	Penyusunan Pengkajian/Penelitian tentang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp624.800.000,-
17	Tabulasi Hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dan Daerah	Rp1.055.462.000,-
18	Partisipasi pada Sidang Parlemen dan Kerja Sama Internasional/Regional/Bilateral	Rp4.467.161.000,-
19	Pengkajian Sistem Ketatanegaraan	Rp1.627.201.000,-
20	Pendidikan dan Pelatihan Setjen DPD	Rp1.885.747.000,-
21	Pendidikan Rintisan Gelar	Rp285.475.000,-
22	Evaluasi Kelembagaan Setjen DPD RI	Rp54.000.000,-

23	Penyusunan Standar Prosedur Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI	Rp54.200.000,-
24	Penyusunan Sistem dan Prosedur Teknis Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi	Rp.259.000.000,-
25	Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran, serta RKA-KL DPD RI dan Setjen DPD RI	Rp969.993.000,-
26	Bimbingan Teknis Penyusunan Renja dan RKA-KL DPD RI dan Setjen DPD RI	Rp254.399.000,-
27	Penyusunan perencanaan untuk kantor DPD RI di Provinsi	Rp562.000.000,-
28	Penyusunan Standar Biaya Kegiatan dan Analisis Hak-hak Keuangan DPD RI	Rp180.000.000,-
29	Penyusunan Penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja dalam RKA-KL DPD RI	Rp18.000.000,-
30	Penyusunan Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Belanja Pegawai dan Validasi Data Aplikasi Gaji	Rp135.000.000,-
31	Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengawasan Administrasi Belanja Pegawai	Rp135.000.000,-
32	Rapat Koordinasi dengan Pemda, Lembaga, dan Kelompok Masyarakat tentang Pengelolaan dan Akuntabilitas Keuangan DPD RI	Rp.142.749.000,-
33	Monitoring Evaluasi Belanja Gaji dan Tunjangan Anggota	Rp135.000.000,-
34	Penyusunan Sistem Akuntansi Keuangan	Rp144.000.000,-
35	Penyusunan Perhitungan dan Rekonsiliasi Anggaran	Rp175.200.000,-
36	Kegiatan Penyiapan Materi tentang Pemeriksaan Inspektorat, BPK, dan BPKP, termasuk tindak lanjutnya	Rp180.000.000,-
37	Penyusunan Managemen Sistem Perbendaharaan dan Perjalanan Dinas	Rp360.000.000,-
38	Kegiatan Pendampingan Penyusunan Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan DPD RI di Kantor Ibukota Provinsi	Rp538.500.000,-
39	Kegiatan Penyiapan Materi tentang Keuangan, Perjalanan Dinas, Perbendaharaan, dan Realisasi Keuangan dalam rangka Sidang/Rapat DPD dan Rapat Kerja/Koodirnasi	Rp135.000.000,-
40	Pengembangan sistem informasi manajemen	Rp281.600.000,-
41	Pemeliharaan jaringan sistem informasi manajemen	Rp2.264.457.000,-
42	Kegiatan penunjang sistem informasi dan perkantoran DPD RI	Rp14.112.000,-

43	Kegiatan penyajian data dan informasi	Rp952.145.000,-
44	Kegiatan Pemberitaan/Publikasi	Rp2.993.021.000,-
45	Pengadaan Koleksi Buku Perpustakaan	Rp33.500.000,-
46	Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Rp29.397.525.000,-
47	Pengadaan Peralatan Penunjang Operasional	Rp1.283.435.000,-
48	Kegiatan monitoring	Rp386.340.000,-
49	Kegiatan revidi dan audit	Rp693.900.000,-

Jakarta, Desember 2016

SEKRETARIS JENDERAL,



Prof. Dr. SUDARSONO HARDJOSOEKARTO
NIP. 195711251983031001



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI



Komplek Parlemen MPR/DPR/DPD RI
JL. Gatot Subroto No. 6 Senayan Jakarta 10270



+ 622157897448



dpdriortala@gmail.com

www.dpd.go.id